



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125

Telepon (0370), 633035, Fax. 626954

Laman <http://www.fh.unram.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 2130/UN18.F3/HK/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM NOMOR : 2497/UN18.9/HK.00.01/2015 TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA SEMESTER GENAP PADA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, perlu mengangkat Promotor dan Ko Promotor pada program studi dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Nomor : 045/UN18.D1/HK/2021 tanggal 19 April 2021 hal Mohon Diterbitkan SK tentang Perubahan Promotor dan Ko Promotor tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut maka perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram tentang Perubahan atas Keputusan .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;
 8. Keputusan Dirjen Dikti Mendikbud Nomor : 30/E/O/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram;

9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram.
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 5105/H18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3237/UN18/KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram Periode Tahun 2018 - 2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3283/UN18/HK/2018 tentang Pengelolaan Program Studi Magister Dan Doktor Di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2018;

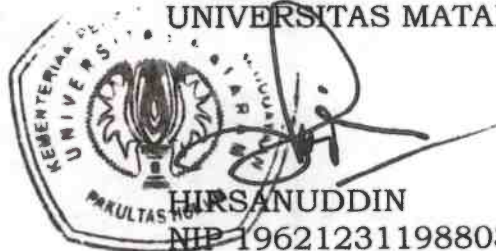
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM NOMOR : 2497/UN18.9/HK.00.01/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA SEMESTER GENAP PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2014/2015;
- KESATU** : Mencabut Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor : 1541/UN18.F3/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor : 2497/UN18.9/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Semester Genap Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2014/2015;
- KEDUA** : Mengangkat saudara-saudara sebagai Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Semester Genap pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2014/2015, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Mataram;

KEMPAT

: Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 April 2021
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM,



HIRSANUDDIN
NIP 196212311988031011

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR : 2130 /UN18.F3/HK/2021
 TANGGAL 30 MARET 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PASCASARJANA UNIVERSITAS
 MATARAM NOMOR :
 2497/UN18.9/HK.00.01/2015 TENTANG
 PENGANGKATAN PEMBIMBING
 DISERTASI MAHASISWA SEMESTER
 GENAP PADA PROGRAM STUDI
 DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS
 MATARAM TAHUN AKADEMIK
 2014/2015;

No.	Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Promotor
1.	Ashari	Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Prof. Haula Adof, SH., LL.M., Ph.D., FCBarb. 2. Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro W., SH., M.Hum. 3. Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. ✓
2.	H. L. Angkasah	Reformasi Birokrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara	1. Prof. Haula Adof, SH., LL.M., Ph.D., FCBarb. 2. Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro W., SH., M.Hum. 3. Prof. Dr. ZainalAsikin, SH., SU.
3.	Imran	Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	1. Prof. Haula Adof, SH., LL.M., Ph.D., FCBarb. 2. Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro W., SH., M.Hum. 3. Dr. RR. Cahyowati, SH., MH.
4.	Gazali	Kajian terhadap Penerapan Perda berbasis Syariah di Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Barat NTB	1. Prof. Haula Adof, SH., LL.M., Ph.D., FCBarb. 2. Prof. Dr. H. L. Husni, SH., M.Hum. 3. Dr. RR. Cahyowati, SH., MH.
5.	L. Jumaidi	Perlindungan Hukum atas Hak-hak Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	1. Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, SH., M.Hum. 2. Prof. Dr. Rodliyah, SH., M.Hum. 3. Dr. Lalu Parman, SH., M.Hum.
6.	Masyuda Nur'ahsan	Urgensi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Bagi Para Pihak	1. Prof. Dr. H. Arba, SH., M.Hum. 2. Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MS. 3. Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum ✓
7.	M. Hotibul Islam	Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam PK.	1. Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, SH., M.Hum. 2. Prof. Dr. Rodliyah, SH., M.Hum. 3. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum.

8.	Samsaimun	Kemandirian Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akte Authentik	1. Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, SH., M.Hum. 2. Prof. Dr. Idrus Abdullah, SH. 3. Dr. Djumardin, SH., M.Hum.
9.	Ainuddin	Prinsip Transparansi dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui <i>Ruislag</i> .	1. Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, SH., M.Hum. 2. Prof. Dr. Idrus Abdullah, SH. 3. Dr. Djumardin, SH., M.Hum.
10.	Abdul Wahab	Kewenangan Pengalihan Penggunaan Tanah Pecatu menjadi Aset Daerah (Studi di Kabupaten Lombok Barat)	1. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA. 2. Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro W., SH., M.Hum. 3. Dr. RR. Cahyowati, SH., MH.
11.	Ahmad Zuhairi	Pemberdayaan Awig-Awig dalam Optimalisasi Sumber Daya Alam di Daerah Pesisir	1. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA. 2. Dr. M. Sood, SH., MH. 3. Dr. RR. Cahyowati, SH., MH.
12.	Tuti Harwati	Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkawinan Siri di Lombok)	1. Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. 2. Prof. Dr. H. Idrus Abdullah, SH. 3. Dr. H. Lalu Sabardi, SH., MS.
13.	Indah Dugi Cahyono	Penyelesaian Sengketa Waris diluar Pengadilan di Sumbawa Barat	1. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA. 2. Prof. Dr. Idrus Abdullah, SH. 3. Dr. M. Sood, SH., MH.
14.	Ulfa Ainul Fitri Alamudi	Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Nominee bagi Orang Asing	1. Prof. Dr. Zainal Asikin, SH., SU. 2. Prof. Dr. H. L. Husni, SH., M.Hum. 3. Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.
15.	Anthoni	Perizinan dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) berdasarkan UU Ketenagalistrikan	1. Prof. Dr. Zainal Asikin, SH., SU. 2. L. M. Hayanul Haq, SH., LL.M. 3. Dr. RR. Cahyowati, SH., MH.
16.	Supriadi	Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing atas Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia	1. Prof. Dr. Zainal Asikin, SH., SU. 2. L. M. Hayanul Haq, SH., LL.M. 3. Dr. Anang Husni, SH., M.Hum.
17.	Ahmad Muhasim	Rekontruksi Hukum Zakat dalam Sistem Hukum Nasional untuk Mensejahterakan Masyarakat Indonesia	1. L. M. Hayanul Haq, SH., LL.M. 2. Dr. Hirsanuddin, SH., MH. 3. Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. ✓

18.	Ahmad Nurjihadi	Rekonstruksi Hukum sebagai Sistem Sosial Telaah Pengembangan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Pendekatan Sistem)	1.L. M. Hayanul Haq, SH., LL.M. 2.Dr. Imam Purwadi, SH., M.Hum. 3.Dr. M. Natsir, SH., M.Hum.
-----	-----------------	--	--



HIRSANUDDIN
 NIP 196212311988031011